

OMBUDSMAN PAPUA BARAT GELAR FOCUS GROUP DISCUSSION IMPLEMENTASI PENYEDIAAN PERUMAHAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

Jum'at, 08 Juni 2018 - Nina Loussiana Lalenoh

Manokwari- Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Nortbertus,SP.,M.Hum di Sw

Nortbertus menyampaikan bahwa, Kajian ini merupakan program tahunan Ombudsman sebagai lembaga pengawas pe terhadap pelayanan publik bagi masyarakat. "Kami melihat bahwa permasalahan perumahan di Papua Barat merupakan per banyak dilaporkan masyarakat kepada kami".

Dalam FGD ini kami libatkan pihak-pihak terkait baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat (instansi vertikal) hingga m bantuan. FGD ini diawali dengan menampilkan hasil kajian yang disampaikan Asisten Ombudsman Rosalina Selaya menemukan banyaknya bangunan perumahan di Papua Barat yang terbengkalai pembangunannya, juga kurangnya koordin minimnya sosialisasi dan pelibatan pihak terkait untuk bantuan perumahan yang diberikan kepada masyarakat ". Sampel pe kami ambil dalam melakukan kajian ini adalah Kabupaten Manokwari, KOta Sorong dan Kabupaten Sorong

" Provinsi Papua Barat tahun 2018 ini memberikan bantuan perumahan bukan hanya bantuan khusus saja (bantuan run bantuan stimulan yang hingga 2018 ini dikelola langsung oleh SNVT Penyedia Perumahan Provinsi Papua Barat yang mer dari Kementerian PUPR. Tetapi bantuan stimulan ini diklaim beberapa pihak tidak melibatkan OPD terkait diKabupa perumahan di Provinsi tidak hanya diberikan oleh Dinas Perumahan dan SNVT Penyedia Perumahan Papua Barat tetapi di Barat sehingga koordinasi inilah yang diperlukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak diberikan lagi kep menerima bantuan sebelumnya selain itu diperlukan komitmen serta tindaklanjut untuk membicarakan terkait persoalan dala dengan melibatkan semua pihak terkait agar program perumahan ini bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat" tutup R

